

**EVALUASI KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)
DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIK KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana
S-1 Ilmu Administrasi Publik**



**Diajukan Oleh :
LATHIFA NUR KHALIJA
NIM. 07011182025017**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**EVALUASI KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS ANAK
(KIA) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KOTA PALEMBANG**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh
Derajat Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik**

Oleh :


**Lathifa Nur Khalija
07011182025017**

Pembimbing


Tanda Tangan

Tanggal

**Drs. Mardianto, M. Si
NIP. 196211251989121001**



**Mengetahui,
Ketua Jurusan**


**Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001**

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**EVALUASI KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)
DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PALEMBANG**

Skripsi

Oleh :


Lathifa Nur Khalija
07011182025017

**Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 21 Maret 2024**

Pembimbing :

Drs. Mardianto, M.Si.
NIP. 196211251989121001

Tanda Tangan



Penguji :

Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

Tanda Tangan



Aulia Utami Putri, S.IP., M. Si
NIP. 199508142019032020



Mengetahui,



Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Publik,

Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lathifa Nur Khalija

NIM : 07011182025017

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul "Evaluasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang" ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan
Palembang, 06 Maret 2024



Lathifa Nur Khalija

NIM. 07011182025017

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Take the risk, or lose the chance"

-Lathifa Nur Khalija

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Diri saya sendiri
2. Keluarga saya, Mama, Bapak, Kakak, dan Adik-adik saya
3. Teruntuk orang-orang yang saya sayangi
4. Seluruh dosen dan pegawai FISIP UNSRI
5. Teman-teman jurusan Ilmu Administrasi Publik 2020
6. Almamater kuning kebanggaan, Universitas Sriwijaya

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa Skripsi dengan judul "Evaluasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang" dengan baik dan tanpa hambatan tertentu, sehingga dapat menyelesaikan studi di jurusan Ilmu Administrasi Publik Sriwijaya.

Penyusunan Skripsi ini sangat bergantung pada bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT atas berkat, izin, karunia, dan kehendak-Nya lah penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
2. Kedua Orang Tuaku yang selalu memberikan dukungan serta doa yang tiada henti untuk kelancaran studi penulis.
3. Kakak dan adik-adik penulis yang tidak pernah lepas dalam memberikan dukungan dan semangat kepada penulis
4. Bapak Drs. Mardianto, M. Si selaku dosen pembimbing Skripsi yang sudah membimbing hingga membantu penulis, serta memberi kemudahan penulis dalam pengerjaan Skripsi ini.
5. Rektor Universitas Sriwijaya, Bapak Dr. Taufiq Marwa, S.E., M. Si
6. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prof Dr. Alfitri, M.Si
7. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S. Sos., M. PA
8. Assyifa Qolbi Maharani, Celi Widya Ayu Ningrum, Haura Prima Rasicha, Siti Robiah selaku teman dan sahabat penulis yang selalu memberikan dukungan serta semangat selama penyusunan skripsi.
9. Dinda Ayu Gusvita selaku sahabat dan adik tercinta yang telah memberikan motivasi maupun dukungan semangat kepada penulis.
10. Adillah Salma Tsamarafatin, Chalollah Nusa Pertiwi, Dela Alma Putri, Filia Azzahra, Muhammad Dhandy Kusuma Jaya selaku teman-teman magang dan teman-teman seperjuangan untuk mendapatkan gelar S. AP

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu banyak selama penulisan skripsi ini. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat dihargai demi mencapai kesempurnaan dalam skripsi ini.

Palembang, 08 Maret 2024

Lathifa Nur Khalija

NIM. 07011182025017

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis evaluasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) yang terjadi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang. Hal yang melatarbelakangi penelitian ini yakni terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Dalam pelaksanaannya, masih banyak permasalahan mengenai implementasi dari Permendagri tersebut karena itu perlu diteliti bagaimana evaluasi implementasi dari kebijakan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang. Penelitian ini ditinjau dari dua variabel besar yaitu Isi Kebijakan (*Content of Policy*) dan Lingkungan Kebijakan (*Context of Policy*) dengan menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan dari hasil analisis data yang telah dilakukan oleh penulis maka dapat memberikan saran yaitu meningkatkan sosialisasi terkait Kartu Identitas Anak (KIA) dengan cara melakukan sosialisasi *door to door* kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui manfaat dan pentingnya dari pembuatan Kartu Identitas Anak untuk anak mereka.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Evaluasi Implementasi, Keberhasilan Implementasi, Kartu Identitas Anak (KIA)

Pembimbing,

Drs. Mardianto, M.Si.
NIP. 196211251989121001

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Dr. M. Nur Budivanto, S.Sos., MPA.
NIP. 1969111019994011001

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out and analyze the evaluation of the Child Identity Card (KIA) policy that occurs within the Palembang City Population and Civil Registration Office. The background of this research is the issuance of the Minister of Home Affairs Regulation Number 2 of 2016 concerning Child Identity Cards. In its implementation, there are still many problems regarding the implementation of the Permendagri because it is necessary to examine how to evaluate the implementation of the Child Identity Card policy at the Palembang City Population and Civil Registration Office. This research is reviewed from two major variables, namely Policy Content (Content of Policy) and Policy Environment (Context of Policy) using qualitative methods. Based on the results of data analysis that has been carried out by the author, it can provide suggestions, namely increasing socialization related to the Child Identity Card (KIA) by conducting door to door socialization to the community so that people know the benefits and importance of making a Child Identity Card for their child.

Keywords: *Policy Evaluation, Implementation Evaluation, Successful Implementation, Child Identity Card (KIA)*

Pembimbing,

Drs. Mardianto, M.Si.
NIP. 196211251989121001



Mengetahui,
Ketua Jurusan



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA.
NIP. 1969111019994011001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II	8
TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Landasan Teori	8
2.2 Konsep Kebijakan Publik	8
2.2.1 Definisi Kebijakan Publik	8
2.2.2 Kriteria Penentuan Kebijakan Publik	10
2.2.3 Kategori Kebijakan Publik	10
2.2.4 Implementasi Kebijakan Publik	12
2.3 Konsep Evaluasi	14
2.3.1 Definisi Evaluasi	14
2.3.2 Sifat Evaluasi	17
2.3.3 Tipe Evaluasi	19
2.4 Konsep Evaluasi Kebijakan	20
2.4.1 Definisi Evaluasi Kebijakan	20
2.4.2 Fungsi Evaluasi Kebijakan	22
2.4.3 Pendekatan Evaluasi Kebijakan	23

2.5 Kartu Identitas Anak.....	24
2.6 Keberhasilan Implementasi Kebijakan.....	26
2.7 Penelitian Terdahulu.....	29
2.8 Kerangka Pemikiran.....	38
BAB III.....	41
METODE PENELITIAN.....	41
3.1 Jenis Penelitian.....	41
3.2 Definisi Konseptual.....	42
3.3 Fokus Penelitian.....	43
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	45
3.5 Informan atau Narasumber Penelitian.....	46
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	47
3.6.1 Observasi.....	48
3.6.2 Wawancara.....	48
3.6.3 Dokumentasi.....	49
3.6.4 Triangulasi.....	49
3.7 Teknik Analisis Data.....	50
3.7.1 Kondensasi Data (<i>Data Condensation</i>).....	51
3.7.2 Penyajian Data (<i>Data Display</i>).....	52
3.7.3 Penarikan Simpulan dan Verifikasi.....	52
3.8 Jadwal Penelitian.....	52
3.9 Sistematika Penulisan.....	52
BAB IV.....	55
PEMBAHASAN.....	55
4.1. Deskripsi Wilayah Penelitian.....	55
4.2. Informan Penelitian.....	58
4.3. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	59
4.3.1. Isi Kebijakan (<i>Content of Policy</i>). Ada 6 Indikator dalam Variabel ini, yaitu:	60
4.3.2 Lingkungan Kebijakan (<i>Context of Policy</i>), Ada 3 Indikator dari Variabel ini :	80
4.4. Matrik Temuan Hasil Penelitian.....	87

BAB V.....	93
PENUTUP.....	93
5.1 Kesimpulan.....	93
5.2 Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA.....	xcviii
LAMPIRAN.....	c

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Rekapitulasi Pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA) Tahun 2023	5
Tabel 2. Penelitian Terdahulu	29
Tabel 3. Fokus Penelitian.....	44
Tabel 4. Informan atau Narasumber Penelitian.....	46
Tabel 5. Informan Penelitian.....	58
Tabel 6. Matriks Temuan Hasil Penelitian.....	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Model Pendekatan Implementation as A Political and Administrative Process (Merilee S. Grindle)	27
Gambar 2. Kerangka Penelitian	39
Gambar 3. Teknik Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif	47
Gambar 4. Triangulasi Data	50
Gambar 5. Model Analisis Data Interaktif	51
Gambar 6. Tampak Depan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang	55
Gambar 7. Struktur Organisasi	58
Gambar 8. Wawancara dengan Warga terkait KIA	66
Gambar 9. Wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	68
Gambar 10. Barcode Pelayanan Online Inovasi SI JAGO	70
Gambar 11. Tampilan Depan Pelayanan Online Inovasi SI JAGO	70
Gambar 12. Tampilan Awal Formulir Inovasi SI JAGO	71
Gambar 13. Tampak Depan UPT Zona VII	74
Gambar 14. Dokumentasi Petugas Pelayanan di UPT Zona VII	74
Gambar 15. Kartu Identitas Anak di Disdukcapil Kota Palembang	76
Gambar 16. Tampak Depan Kartu Identitas Anak (KIA)	77
Gambar 17. Mesin yang Dapat Mencetak KIA	79
Gambar 18. Wawancara dengan Kepala UPT Zona VII Kota Palembang	82
Gambar 19. Layanan Pengaduan/Saran dan Kritik Disdukcapil Kota Palembang	83
Gambar 20. Pegawai UPT Zona VII yang Sedang Melayani Masyarakat	86

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. PERMENDAGRI NOMOR 2 TAHUN 2016.....	c
Lampiran 2. Surat Keputusan Dosen Pembimbing Skripsi.....	cvii
Lampiran 3. Kartu Bimbingan Seminar Proposal.....	ciX
Lampiran 4. Kartu Bimbingan Ujian Komprehensif	CX
Lampiran 5. Lembar Perbaikan Seminar Proposal Skripsi	Cxi
Lampiran 6. Surat Izin Penelitian	Cxii

DAFTAR SINGKATAN

KIA	Kartu Identitas Anak
Permendagri	Peraturan Menteri Dalam Negeri
UU	Undang-Undang
Disdukcapil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Adminduk	Administrasi Kependudukan
SIAK	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
KK	Kartu Keluarga
SI JAGO	Sikok Jadi Tigo

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia, mencatatkan populasi sekitar 277,7 juta jiwa. Pertumbuhan penduduk yang pesat dan populasi yang besar ini menyebabkan data kependudukan bersifat dinamis dan terus berubah seiring waktu. Kondisi ini mendorong pemerintah Indonesia untuk meningkatkan sistem pelayanan dan merumuskan kebijakan-kebijakan baru, terutama di sektor administrasi kependudukan. Salah satu upaya penting dalam menjamin keabsahan data kependudukan, khususnya untuk anak-anak adalah melalui penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA).

Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan produk dokumen kependudukan yang memiliki peran strategis dalam memastikan validitas dan keabsahan data kependudukan anak di Indonesia. KIA dirancang sebagai instrumen administrasi yang mampu mencatat informasi esensial mengenai identitas dan status kependudukan seorang anak. Dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai identifikasi resmi, tetapi juga memberikan akses kepada berbagai hak dan pelayanan publik yang menjadi hak anak sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku. Dengan adanya Kartu Identitas Anak, pemerintah dapat memantau dan mengelola data kependudukan anak secara lebih efisien dan akurat. Dalam konteks pertumbuhan populasi yang dinamis, KIA juga berperan sebagai alat kontrol dan regulasi

untuk memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi dengan baik. Selain itu, KIA memberikan dasar yang kuat bagi implementasi kebijakan-kebijakan khusus yang berhubungan dengan perlindungan dan kesejahteraan anak di Indonesia. Melalui upaya ini, pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap anak di negara ini memiliki akses yang adil dan setara terhadap layanan dan perlindungan sesuai dengan hak-haknya.

Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, penerapan Kartu Identitas Anak juga memberikan dasar untuk integrasi sistem administrasi kependudukan dengan teknologi canggih. Dengan adopsi teknologi, pemerintah dapat memantau dan mengelola data kependudukan anak secara *real-time*, memungkinkan respons yang cepat terhadap kebutuhan dan masalah yang muncul. Dengan demikian, KIA tidak hanya menjadi alat administrasi, tetapi juga menjadi jembatan untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak di Indonesia di era modern ini. Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan implementasi dari konsep perlindungan hak anak yang diakui secara internasional. Penerbitan KIA didasarkan pada sejumlah instrumen hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional. Di tingkat internasional, KIA sejalan dengan Konvensi Hak Anak 1989 yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Konvensi ini menetapkan hak-hak anak sebagai individu dengan status hukum sendiri dan mengamanatkan perlindungan terhadap identitas mereka (Pasal 7). Oleh karena itu, penerbitan KIA secara langsung mendukung pemenuhan kewajiban negara untuk melindungi hak-hak dasar anak.

Di tingkat nasional, penerbitan KIA diatur dalam berbagai undang-undang dan peraturan terkait administrasi kependudukan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

tentang Administrasi Kependudukan, sebagai payung hukum utama dalam hal administrasi kependudukan di Indonesia, memberikan landasan hukum bagi penerbitan KIA. Pasal 35 UU tersebut menyebutkan bahwa setiap anak berhak memperoleh KIA sebagai bukti identitas diri dan status kependudukannya. Disamping itu, Undang-Undang Perlindungan Anak juga turut memberikan landasan hukum terkait hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan identitas yang sah.

Pengimplementasian Kartu Identitas Anak (KIA) di Indonesia didasarkan pada landasan hukum yang kuat, yang mengakar dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Pasal 2 Permendagri tersebut secara jelas memandatkan bahwa setiap anak warga negara Indonesia berhak memperoleh KIA sebagai tanda bukti identitas dan status kependudukan anak. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan hak anak yang diakui secara internasional, sebagaimana diamanatkan dalam Konvensi Hak Anak 1989 yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Selain itu, Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 juga memberikan ketentuan-ketentuan teknis terkait dengan data yang harus dicantumkan dalam KIA, prosedur penerbitan, dan mekanisme pengawasan. Hal ini memberikan kepastian hukum dan landasan operasional bagi pemerintah daerah dan instansi terkait dalam melaksanakan program penerbitan KIA. Dengan demikian, Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 memberikan landasan hukum yang kuat dan rinci bagi implementasi KIA sebagai instrumen administrasi kependudukan yang memastikan validitas dan keabsahan data kependudukan anak di Indonesia.

Selain UU Administrasi Kependudukan dan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016, KIA juga didukung oleh peraturan pelaksanaan yang lebih rinci dan teknis. Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PP No. 2 Tahun 2012 tentang KTP Elektronik menyediakan landasan bagi pelaksanaan pembuatan KIA secara rinci, termasuk prosedur pengambilan data dan persyaratan administratif yang harus dipenuhi, dan juga didukung dengan Peraturan Walikota Palembang Nomor 52 Tahun 2015 tentang Kartu Intensif Anak. Dengan demikian, hal tersebut memastikan bahwa penerbitan KIA dilakukan dengan standar tinggi dan memenuhi kriteria validitas yang diamanatkan dalam UU Administrasi Kependudukan. Penetapan dasar hukum yang kuat untuk Kartu Identitas Anak (KIA) mencerminkan keseriusan pemerintah Indonesia dalam memastikan hak-hak anak terpenuhi, terutama di bidang administrasi kependudukan. Melalui kerangka hukum yang kokoh, penerbitan dan penggunaan KIA menjadi suatu langkah penting dalam memperkuat dan memperbaiki sistem kependudukan, dengan tujuan akhir untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan optimal bagi anak-anak Indonesia.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan KIA, pemerintah Kota Palembang telah mengembangkan sebuah inovasi baru yang dikenal sebagai Sikok Jadi Tigo (SI JAGO). Program ini merupakan inisiatif yang diluncurkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang dengan tujuan untuk memastikan ketersediaan dokumen kependudukan bagi masyarakat. Melalui program ini, warga akan memperoleh tiga jenis dokumen sekaligus, yaitu Kartu Keluarga baru, Akta Kelahiran Anak, dan Kartu Identitas Anak.

Per tahun 2023, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang telah melakukan rekapitulasi data terkait permohonan cetak Kartu Identitas Anak (KIA) dari usia 0-17 tahun di Kota Palembang.

Tabel 1. Data Rekapitulasi Pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA) Tahun 2023

BULAN	PENCETAKAN LANGSUNG	JUMLAH ANAK USIA 0-17 TAHUN	REALISASI (%)	TARGET 2023
Januari 2023	226.147	509.179	44,41	50%
Februari 2023	229.924	490.855	46,84	50%
Maret 2023	232.621	490.855	47,39	50%
April 2023	234.283	490.855	47,73	50%
Mei 2023	236.663	490.855	48,21	50%
Juni 2023	238.056	490.855	48,50	50%
Juli 2023	242.008	490.855	49,31	50%
Agustus 2023	243.651	490.855	48,37	50%

Sumber: Diolah peneliti dari Data Rekapitulasi Kinerja Pencetakan Kartu Identitas Anak di Kota Palembang Tahun 2023.

Berdasarkan dari data tabel diatas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang telah mencetak sebanyak 1.883.353 KIA. Namun, dari hasil pencetakan tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang di tahun 2023 hanya mencapai sebesar 47,5% dari target nasional yang telah ditetapkan sebesar 50%.

Kendala dalam pelaksanaan program Kartu Identitas Anak disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama adalah kurangnya upaya sosialisasi yang dilakukan pemerintah, baik melalui media sosial maupun melalui penyuluhan langsung kepada masyarakat. Kelemahan ini mengakibatkan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk melakukan proses pengurusan dokumen kependudukan, khususnya terkait Kartu Identitas Anak. Faktor kedua adalah minimnya upaya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang terhadap lembaga pengguna, seperti lembaga pendidikan. Seharusnya, lembaga pendidikan mampu memanfaatkan Kartu Identitas Anak sebagai persyaratan pendaftaran anak ke sekolah. Hal ini dikarenakan Kartu Identitas Anak merupakan data yang sah dan terverifikasi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dengan demikian, informasi mengenai identitas anak-anak tersebut akan menjadi lebih akurat karena telah melalui proses verifikasi yang ketat.

Melihat kendala-kendala tersebut, penting untuk diakui bahwa Kartu Identitas Anak (KIA) memiliki signifikansi yang besar bagi anak-anak yang berusia 0 - 17 tahun. Kesadaran akan hal ini mendorong perlunya pemahaman terhadap semua hambatan yang dihadapi dan harus mengadopsi strategi yang tepat untuk menyelesaikannya. Tindakan ini sangat penting agar program KIA dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta untuk meningkatkan standar pelayanan publik dalam upaya mengoptimalkan administrasi kependudukan bagi warga yang menetap di Kota Palembang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut : "Bagaimana Keberhasilan Implementasi Kebijakan Kartu

Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palembang”.

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui keberhasilan Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palembang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam mengembangkan pengetahuan dan informasi bagi Ilmu Administrasi Publik mengenai evaluasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan kontribusi dalam mengevaluasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. (2019). *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas (Pengantar Pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis)*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia: Jakarta.
- Agustino, Leo. (2022). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung
- Akbar, Muh. Friyal & Widya Kurniati Mohi. (2018). *Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi Beberapa Kebijakan di Indonesia)*. Ideas Publishing: Gorontalo.
- Anggara, Sahya & Endang Soetari. (2014). *Kebijakan Publik*. Pustaka Setia: Bandung.
- Dunn, William N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Gajah Mada University Press: Yogyakarta.
- Fajarwati, Arnia & Ulda Rahmadilla. (2022). *Model Implementasi Kebijakan Merilee Grindle (Studi Kasus Penyerapan Tenaga Kerja Lokal Pada PT. Meiji Rubber Indonesia Kabupaten Bekasi)*. Jurnal Dialog, Vol. 7 No. 1. <http://journal.unla.ac.id/index.php/dialog/article/view/2067>, diakses pada 11 Januari 2024
- Hajaroh, Mami. (2018). *Pohon Teori Evaluasi Kebijakan Dan Program (Metode, Nilai dan Menilai, Penggunaan)*. Foundasia, Vol IX No. 1. <https://doi.org/10.21831/foundasia.v9i1.26149>, diakses pada 28 September 2023
- Hardani, dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu: Yogyakarta.
- Khusufmawati, Enung dkk. (2021). *Implementasi Kebijakan Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung (Studi Tentang Kendaraan Dinas Operasional)*. Moderat, Vol. 7 No. 4. <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat/article/view/2543/1938>, diakses pada 20 Januari 2024
- Miles & Huberman. (2014). *Qualitative Data Analysis*. SAGE: Amerika Serikat.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak
- Peraturan Walikota Palembang Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Kartu Insentif Anak.
- Peraturan Walikota Palembang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Pramono, Joko. (2020). *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Unisri Press: Surakarta.
- Richafinsani & Erwin Musadah. (2022). Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Kota Makassar. Politeknik STIA LAN Bandung, Vol. 6 No. 1. <https://knia.stialanbandung.ac.id/index.php/knia/article/view/815>, diakses pada 20 Januari 2024
- Rizqi, Muhammad & Indah Prabawati. (2020). *Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo*. Jurnal Publika, Vol 8 No. 5. <https://doi.org/10.26740/publika.v8n5.p%25p>, diakses pada 20 Januari 2024
- Sumarsyah, Wilda. (2021). *Evaluasi Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Tahun 2019- 2020 Di Kecamatan Lubuk Basung*. Jurnal Manajemen & Kebijakan Publik, Vol. 3 No.1. <https://jurnal.umb.ac.id/index.php/JMPKP/article/view/4529>, diakses pada 09 September 2023
- Taufiqurokhman. (2014). *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama Pers: Jakarta Pusat.